

Kajian pemanfaatan sumber daya ikan tuna secara berkelanjutan (studi pada perikanan handline tuna yang menggunakan rumpon di Perairan Selatan Palabuhanratu) = Study of sustainable utilization of tuna fish resources (study on handline tuna fisheries using fish aggregating devices fads in the Southern of Palabuhanratu waters) / Ignatius Tri Hargiyatno

Ignatius Tri Hargiyatno, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476310&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perkembangan penangkapan perikanan tuna seiring dengan perkembangan penggunaan Fish Agregating Devices FADs atau rumpon sebagai alat untuk mengumpulkan sumber daya ikan tuna. Masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan rumpon memiliki dampak terhadap kondisi sumber daya ikan, sosial dan ekonomi nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan sumber daya ikan tuna dengan menggunakan handline yang berasosiasi dengan rumpon secara berkelanjutan di PPN Palabuhanratu dari aspek biologi sumber daya, sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode selektivitas, LB-SPR, persepsi masyarakat dan kelayakan usaha penangkapan. Hasilnya menunjukkan penggunaan handline selektif terhadap sumber daya ikan cakalang Katsuwonus pelamis, namun tidak selektif terhadap sumber daya ikan madidihang Thunnus albacares dan tuna mata besar Thunnus obesus. Nilai Spawning Potential Ratio SPR atau potensi rasio pemijahan sumber daya ikan cakalang berada diantara limit reference point 20 dan target reference point 40 yang berarti dalam kondisi fully-exploited, sedangkan sumber daya madidihang dan tuna mata besar berada dibawah 20 yaitu dalam kondisi over-exploited. Hasil analisis sosial menunjukkan bahwa penggunaan rumpon bagi nelayan handline di PPN Palabuhanratu tidak menimbulkan adanya konflik pemanfaatan. Terdapat peluang diberlakukannya kebijakan karena nelayan memahami adanya peraturan rumpon dan bersedia mentaati kebijakan yang akan diberlakukan. Hasil analisis kelayakan usaha penangkapan sumber daya ikan tuna dengan handline dikategorikan menguntungkan dan dapat dilanjutkan. Berdasarkan kondisi sumber daya ikan, sosial dan ekonomi nelayan penangkapan sumber daya ikan tuna dengan menggunakan handline di sekitar rumpon dapat dilanjutkan. Kebijakan pemanfaatan rumpon secara berkelanjutan yang direkomendasikan adalah dengan memperbaiki ijin pemasangan rumpon, zonasi daerah penangkapan, pembagian kewenangan, pemberdayaan komunitas masyarakat dan pengaturan operasi penangkapan.

<hr />

ABSTRACT

Tuna fishery development is in line with the use of Fish Aggregating Devices FADs as a tool to gather tuna resources. The problem in this research is that the use of FADs has an impact on fish resources, as well as social problem and fisher rsquo s economic condition. This study will examine the utilization of tuna resources by handline fishers that associated with FADs in PPN Palabuhanratu in terms of fish resources, social and economic aspects using several approaches i.e. selectivity, LB SPR, public perception and feasibility of fishing effort. The results show that handline is selective on skipjack tuna Katsuwonus pelamis, but not on yellowfin tuna Thunnus albacares and bigeye tuna Thunnus obesus. The Spawning Potential

Ratio SPR of skipjack fish is in between the limit reference point 20 and the target reference point 40 , which means this fish resources is in fully exploited condition, while yellowfin and big eye tuna have reached overfishing condition below 20 . The use of FADs for the handline fishery in PPN Palabuhanratu does not cause any conflict. There is an opportunity for policy enforcement because the fishers are understands the existence of the FADs regulation and willing to obey the policy. Results on feasibility analysis show that handline tuna fishery in Palabuhanratu is still profitable and can be continued. Based on the condition of fish resources, social and economic fishers, catching tuna using handline around FADs are in sustainable level. This paper recommends the policy of sustainable use of FADs by improving the installation permit of FADs, zoning of fishing grounds, divide management authority, community empowerment and arrange of fishing operations.